

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan/atau Sumber Lainnya

Agus, P., & Rasida. (t.thn.). *Mahir Praktik Perpajakan Bendahara Edisi 2019*. WiKuePedia.

Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Asmarani, N. G. (2020, Januari 31). *Bakal Dihapus Per 1 April 2020, Apa Itu NPWP Bendahara Pemerintah?* Diambil kembali dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/bakal-dihapus-per-1-april-2020-apa-itu-npwp-bendahara-pemerintah-18695>

Badan Pusat Statistik. (t.thn.). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Barata, A. A., & J. D. (2006). *POT-PUT & KEPALU PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN dan KREDIT PAJAK LUAR NEGERI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Belitung, T. U. (2016, Januari 11). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari babel.bpk.go.id: <https://babel.bpk.go.id/pengelolaan-dan-pemanfaatan-dana-kapitasi->

jaminan-kesehatan-nasional-pada-fasilitas-kesehatan-tingkat-pertama-
milik-pemerintah-daerah/

Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). *Halaman Laporan Tahunan DJP*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Hidayat, N. (2015). *Corporate Tax Risk Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS.

Hidayat, N. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Percetakan Bintang.

Kurniawan, A. (2016, Oktober). *Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional*. Diambil kembali dari jdih.bpk.go.id: <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/10/penggunaan-dana-kapitasi-JKN-pada-FKTP-pemda.pdf>

LKPP. (t.thn.). *Pejabat Pengadaan (PP) - E-Katalog LKPP*. Diambil kembali dari e-katalog.lkpp.go.id: <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/download-file/14>

Nurachmad, M. (2011). *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan: VisiMedia.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan : edisi 3*. Jakarta: Granit.

Prastowo, Y., Priyatna, A., & Yosep, N. E. (2011). *Buku Pintar Menghitung Pajak Pofesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.

SELIGMAN, E. R. (1914). *THE INCOME TAX*. New York: THE MACMILLAN COMPANY.

Seligman, E. R. (1915). *Essays In Taxation*. New York: The Macmillan & Co.,LTD.

Soemitro, R. (1988). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.

Sorongon, C. T. (2014). PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTA BITUNG. *Jurnal EMBA Vol.2 No. 1*, 704-714.

Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit ANDI.

Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Ed. 3*. Jakarta: Kencana.

Thian, A. (2021). *Dasar Dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi.

Walandouw, P. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25. *Jurnal EMBA 991 Vol.1 No. 3*, 987-997.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan Ed. 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, *tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. 010/2017, *tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, *tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021, *tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, *tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Instansi Pemerintah.*